



ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN 2019 URUSAN KEISTIMEWAAN

Musrenbang DIY 2017



Lingkup Paparan

- Arah kebijakan dan Strategi 2017-2022
- Tolok Ukur keberhasilan 2019

PANCA ARAH KEBIJAKAN URUSAN KEBUDAYAAN 2017-2021

BUDAYA &
PARIWISATA

PENDIDIKAN

EKONOMI

PANGAN

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
KETERLINDUNGAN
WARGA



BUDAYA DAN PARIWISATA



ARAH KEBIJAKAN

1. Memperkuat kapasitas manusia dalam praktik penghidupan di sektor pertanian, maritim, dan perdagangan (among tani dagang layar) dalam rangka untuk membangun kemandirian, keunggulan, ketangguhan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan Yogyakarta sebagai pusat pelestarian urusan kebudayaan berbasis pada aset sejarah, asal usul, dan destinasi budaya;
3. Mewujudkan suprastruktur dan infrastruktur kebudayaan yang dapat mendukung perlindungan, pengembangan, pemanfaatan budaya tangible;
4. Mewujudkan suprastruktur dan infrastruktur pendidikan karakter yang dapat mendukung upaya perlindungan dan pengembangan, pemanfaatan budaya intangible;
5. Mewujudkan wilayah konservasi budaya, lumbung budaya, dan revitalisasi budaya;
6. Mewujudkan tata kelola kepariwisataan berbasis budaya yang mensejahterakan masyarakat.

STRATEGI

1. Meningkatkan kesadaran ideologis, kapasitas, dan ketrampilan multistakeholder pembangunan lintas generasi, utamanya generasi muda, untuk menggeluti penghidupan di sektor pertanian, maritim, dan perdagangan (among tani dagang layar)
2. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap identitas budaya Yogyakarta
3. Mengembangkan ruang-ruang publik sebagai arena apresiasi pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan budaya tangible
4. Memperkuat pengarusutamaan nilai-nilai keistimewaan sebagai basis pendidikan karakter
5. Memformulasikan regulasi dan penguatan kelembagaan konservasi, dan pengembangan budaya di desa dan kelurahan
6. Memperkuat infrastruktur kepariwisataan yang berbasis nilai-nilai keistimewaan terutama akses, pengembangan, dan pelatihan

PENDIDIKAN KARAKTER



PENDIDIKAN



ARAH KEBIJAKAN :

1. Mewujudkan pendidikan karakter manusia sosial yang penuh keutamaan berbasiskan filosofi sangkan paraning dumadi, hamemayu hayuning bawana, dan manunggaling kawula lan gusti.
2. Mewujudkan infrastruktur, lingkungan, dan layanan pendidikan yang mendukung terwujudnya manusia sosial yang berkarakter solider, kolegal, pluralis, multikultur yang berguna bagi sesama (*migunani mring sesami*).
3. Mewujudkan praktik kultur pendidikan berbasis budaya yang menginspirasi pada pendidikan global.
- 4 Mewujudkan praktik pendidikan yang menginspirasi kultur ekologi untuk pelestarian lingkungan berkelanjutan

STRATEGI :

- 1 Memperkokoh dan memperluas pembelajaran filosofi dan praksis nilai-nilai budaya Yogyakarta.
- 2 Memperkuat pengembangan sarana prasarana infrastruktur dan pengkondisian lingkungan pendidikan berkarakter nilai-nilai keistimewaan
- 3 Mengakselerasikan penguatan pendidikan karakter nilai-nilai budaya keistimewaan dan pengarusutamaan alternatif pendidikan global
- 4 Memperkuat pengarusutamaan kultur pendidikan ekologis yang terintegrasi bagi terwujudnya lingkungan yogyakarta yang lestari dan berkelanjutan



EKONOMI



ARAH KEBIJAKAN

1. Mengembangkan industri kreatif berbasis aset dan potensi budaya.
2. Mewujudkan sistem penghidupan (livelihood) dan pasar ekonomi yang berkeadilan, berkeunggulan dan modern untuk menopang kehidupan masyarakat yang lebih mandiri, tangguh dan sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat yang memiliki jiwa enterpreunership untuk menumbuhkan wirausahawan

STRATEGI

1. Memperkuat fasilitasi akses permodalan, penguatan kapasitas, teknologi tepat guna dan jejaring pemasaran
2.
 - a. Memberdayakan masyarakat di sektor pertanian, perikanan dan perdagangan serta proteksi pasar
 - b. Menumbuhkan pasar tradisional sebagai pusat pengembangan dan pertahanan ekonomi masyarakat
3. Mendorong tumbuhnya jiwa wirausaha bagi masyarakat



PANGAN



ARAH KEBIJAKAN

1. Mewujudkan kedaulatan pangan dengan merevitalisasi sistem produksi pangan dan lumbung pangan desa sebagai model ketahanan sosial, ekonomi dan budaya.
2. Memperkuat budaya pangan lokal yang sehat.
3. Mewujudkan kawasan agropolitan dengan konsep pertanian terpadu untuk mendukung pertanian berkelanjutan.

STRATEGI

1. Mengembangkan sistem produksi dan lumbung pangan yang berbasis pada pengalokasian lahan-lahan Sultan ground dan Pakualaman ground dan pendayagunaan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong gerakan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan budaya pangan lokal yang sehat
3. Merumuskan kebijakan kawasan agropolitan yang disinergikan dengan rencana tata ruang terpadu sebagai penyangga ketahanan pangan, sarana edukasi dan destinasi wisata



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KETERLINDUNGAN WARGA



ARAH KEBIJAKAN

1. Mewujudkan desa sebagai basis pemberdayaan ekonomi sosial budaya yang terintegrasi.
2. Penguatan kelembagaan lokal yang mendorong tumbuhnya kapasitas dan sumber daya masyarakat dalam menekuni, mendalami dan mengapresiasi karya di bidang seni pertunjukan, seni rupa dan desain, seni rekam media.
3. Mewujudkan mentalitas masyarakat berkarakter yang menjunjung nilai-nilai kolegalitas (kemaslahatan).
4. Merevitalisasi kelembagaan organik di bidang ketahanan, ketertiban, dan keterlindungan warga untuk mewujudkan DIY yang sehat, nyaman, damai, dan ramah bagi semua.

STRATEGI

1. Memperkuat keterlibatan desa sebagai mitra pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang terintegrasi .
2. Memperkuat pemberdayaan komunitas seni dan budaya melalui pemerintahan desa/kelurahan dalam koordinasi dan pembinaan Camat
3. Memfasilitasi desa-desa dan kelurahan untuk mengembangkan nilai dan budaya asal-usul dan pendidikan karakter.
4. Memperkuat potensi lembaga lokal untuk meningkatkan kepedulian sosial, kerukunan, dan perlindungan warga.

INDIKATOR KEBUDAYAAN - PARIWISATA

- 1. a. Terintegrasinya program penguatan sektor trinitas pertanian, maritim, dan perdagangan ke dalam sistem kurikulum dan pengajaran di sekolah formal, informal dan non formal**
 - b. Adanya mata pelajaran filosofi budaya dan nilai – nilai ke-Yogyakarta-an**
 - c. Adanya program penguatan kesadaran, kapasitas dan ketrampilan dalam trinitas penghidupan pertanian, maritim dan perdagangan demi kesejahteraan keluarga**
 - d. Meningkatnya kapasitas SDM pengelola desa budaya untuk mendukung upaya konservasi dan pengembangan segenap aset di lingkungan desa budaya**
- 2. a. Tumbuhnya partisipasi warga dalam perlindungan nilai-nilai budaya sebagai aset budaya**
 - b. Tumbuhnya kelembagaan organik di tingkat masyarakat terkait perlindungan nilai-nilai budaya sebagai aset budaya**
- 3. a. Munculnya prakarsa masyarakat dalam aspek perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan aset budaya**
 - b. Tumbuhnya jejaring kelompok warga untuk memperkuat pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya**

4.
 - a **Terfasilitasinya kelompok-kelompok masyarakat/ komunitas dalam**
 - **menanamkankan nilai-nilai keistimewaan**
 - b **Adanya program pengembangan kelompok penanaman dan pembelajaran nilai-**
 - **nilai keistimewaan**
5.
 - a **Adanya prakarsa program dari warga tentang perlindungan, pengembangan dan**
 - **pemanfaatan potensi dan asset budaya di desa dan kelurahan**
 - b **Mulai munculnya gerakan warga dalam perlindungan, pengembangan, dan**
 - **pemanfaatan potensi dan aset budaya di desa dan kelurahan**
6.
 - a **Adanya kelompok-kelompok masyarakat sadar wisata dan pamong wisata**
 -
 - b **Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung**
 - **pengembangan wisata berbasis budaya**

INDIKATOR KEBUDAYAAN-PENDIDIKAN

1.

- a. Yogyakarta untuk Guru-Guru (SD, SMP, SMA & SMK), mahasiswa, dosen, dan umum
 - b. Pemberian penghargaan kepada guru/tenaga didik, dan siswa teladan sebagai role model nilai-nilai budaya Yogyakarta
 - c. Adanya peningkatan dan akumulasi kualitas dan kuantitas kurikulum pendidikan karakter berbasis budaya Yogyakarta yang semakin menjangkau seluruh jenjang pendidikan di DIY
 - d. Adanya peningkatan dan penguatan kapasitas tenaga didik/pengajar untuk program pendidikan karakter berbasis budaya Yogyakarta
 - e. Adanya rancangan pengembangan jejaring kerjasama pendidikan berbasis budaya Yogyakarta melalui penguatan jejaring kerjasama institusi pendidikan
- 2.
- f. Adanya Pengembangan kajian dan penelitian melalui pemberian hibah riset penggalan dan pengembangan nilai-nilai Keistimewaan
 - g. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur pendidikan yang kondusif untuk menopang program pendidikan karakter berbasis budaya Yogyakarta bertaraf nasional

- a. Adanya inisiasi “branding image” pendidikan Akademi Komunitas Seni Yogyakarta melalui pengembangan jejaring kerjasama pendidikan dengan multistakeholder di tingkat nasional
- b. Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi gamelan dalam “Inkubator Bisnis Produksi Gamelan”
- c. Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana/prasarana model sekolah untuk pendidikan “pluralisme dan multikulturalisme”
- d. Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana/prasarana dan kelembagaan dalam model sekolah pendidikan “pluralisme dan multikulturalisme”
- e. Meningkatnya kinerja program kelembagaan “School of Thought” atau “pengarus-utamaan mazhab pemikiran” Keistimewaan Yogyakarta
- f. Adanya Pengembangan program pendidikan “hibriditas budaya nusantara” lintas provinsi di Indonesia

3.
 - a. Adanya Pengembangan program pendidikan “hibriditas budaya nusantara” lintas provinsi di Indonesia
 - b. Adanya Pengembangan forum komunikasi, dialog, dan praksis budaya antar etnik Nusantara
 - c. Adanya Pengembangan program pengarusutamaan nilai-nilai budaya dan promosi produk-produk budaya Yogyakarta di tingkat provinsi
 - d. Adanya Pengembangan kuantitas dan kualitas sarana prasarana sistem informasi aset budaya dan industri budaya
4.
 - a. Adanya Pengembangan model pendidikan pengelolaan lingkungan hijau yang terintegrasi di tingkat provinsi
 - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana yang mendukung pendidikan berbasis pelestarian lingkungan
 - c. Pengembangan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi lingkungan dan pelestarian air tanah
 - d. Penguatan pengorganisasian masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan bantaran sungai
 - e. Penguatan penyadaran masyarakat terhadap konservasi sumberdaya alam

EKONOMI

1. Terwujudnya koneksitas antar stakeholder terkait yang berhubungan dengan akses permodalan, penguatan kapasitas, teknologi tepat guna dan jejaring pemasaran
2.
 - a. Adanya kebijakan yang berpihak pada sektor pertanian, perikanan dan perdagangan
 - b. Adanya kebijakan tentang sistem pasar yang berkeadilan
3. Terdesiminasiakannya pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan di masyarakat

PANGAN

1. Adanya kebijakan tentang diversifikasi pangan melalui konsep among *tani dagang layar*
2. Adanya kebijakan tentang pangan lokal yang sehat
3. Adanya kebijakan tentang pertanian terpadu

INDIKATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KETERLINDUNGAN WARGA

1.
 - a. Ada urusan keistimewaan skala desa yang menjadi bagian dari Perdes Kewenangan Desa.
 - b. Ada program keistimewaan skala desa yang masuk dalam RPJMDesa, RKPDesa.
 - c. Ada program keistimewaan yang dilaksanakan oleh kelompok/komunitas.
 - d. Ada inisiasi/forum diskusi pengembangan kawasan antar desa yang berkaitan dengan keistimewaan.
 - e. Ada ekonomi perdesaan yang didukung oleh program keistimewaan.

2.
 - a. Ada regulasi desa yang mendukung kreatifitas budaya lokal.
 - b. Ada pertumbuhan kelompok seni di kota dan desa
 - c. Ada ruang publik yang strategis di setiap desa.
 - d. Ada apresiasi karya seni dan budaya di ruang publik.

.

3.
 - a. Ada kampanye pendidikan karakter antar pemuda dan antar desa.
 - b. Ada sharing pengalaman antar pemuda desa yang mendorong nilai kolegalitas.

4.
 - a. Mulai tumbuh komunitas peduli Perempuan dan anak di setiap kecamatan dan desa.
 - b. Ada komite perlindungan Perempuan dan anak di setiap kabupaten dan kota.
 - c. Desa-desa memiliki Peraturan tentang ketertiban dan keterlindungan warga.
 - d. Kegiatan siskamling dan voluntarisme jaga warga yang semakin antusias di desa dan kelurahan.
 - e. Munculnya kelembagaan lokal peka konflik.

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS

URUSAN KELEMBAGAAN

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Mengelaborasi aspek bentuk dan tata kelola kelembagaan pemerintahan asli	- Mempedomani nilai – nilai budaya luhur DIY dalam penyelenggaraan Pemerintahan
		- Melembagakan peran dan tanggungjawab kasultanan dan kadipaten dalam memperkuat keistimewaan kelembagaan
2	Mengelaborasi Aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan berdasarkan regulasi nasional	- Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap regulasi kelembagaan nasional untuk memperkuat kelembagaan DIY
3	Mengelaborasi Aspek bentuk dan tata kelola pemerintahan yang ideal	- Menerapkan prinsip <i>rightsizing</i>
		- Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance
4	Mengarusutamakan keistimewaan dalam kelembagaan	- Mendesain lembaga yang memiliki keunikan sebagai penciri keistimewaan
		- Internlisasi keistimewaan dalam setiap lembaga
5	Mengembangkan desain kelembagaan pemerintahan DIY yang pro kesejahteraan rakyat	- Menyusunan blue print kelembagaan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS URUSAN PERTANAHAN

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Mewujudkan Administrasi Pertanahan keistimewaan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan Pelayanan Perijinan Pertanahan Keistimewaan. - Memformulasikan Penyelesaian konflik dan sengketa. - Harmonisasi status tanah yang sudah ada baik yang sudah dikuasai masyarakat. - instansi maupun yang belum ada penguasanya agar memiliki Kepastian Hukum.
Mewujudkan Tertib Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah SG dan PAG	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Kepastian Hukum untuk Tanah-Tanah SG dan PAG. - Membangun Tanah SG dan PAG yang sesuai peruntukannya. - Memformulasi Penyelesaian konflik Tanah SG dan PAG. - Membangun Instrumen Kebijakan Tanah SG dan PAG.
Mewujudkan Sistem Informasi Pertanahan Keistimewaan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan Ketersediaan Data Base Pertanahan. - Mengembangkan instrumen sistem informasi pertanahan keistimewaan. - Mengembangkan teknik-teknik pemeliharaan sistem informasi pertanahan keistimewaan.

<p><i>Pelaksanaan Tata Ruang Kesitimewaan</i></p> <p>Membuat dan melengkapi perencanaan tata ruang seluruh ruang keistimewaan dan memperkuat pengendalian tata ruang pada seluruh ruang keistimewaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan Penyusunan RTR skala rinci pada ruang-ruang keistimewaan yang belum ada RTR-nya. - Mendorong Penerapan Rencana Tata Ruang sesuai dengan Rencana RTR skala rinci (RDTR/PZ) baik RTR skala rinci yang telah menjadi perda maupun yang masih berbentuk dokumen kajian dengan terobosan hukum (Pergub/Perbup/Perwal) - Memperkuat pengendalian dengan mempertajam rekomendasi dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang agar sesuai dengan RTR, instrumentasi insentif disinsentif dan mekanisme pemberian sanksi pelanggar RTR.
<p><i>Pengawasan Tata Ruang Keistimewaan</i></p> <p>Mewujudkan pengawasan pelaksanaan dan perwujudan tata ruang keistimewaan secara keseluruhan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang agar perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen RTR yang telah ada, baik yang berada di ruang-ruang keistimewaan maupun kawasan lainnya - Mendorong antisipasi dan penyelesaian konflik dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang di ruang-ruang keistimewaan

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN URUSAN PERTANAHAN

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KEBERHASILAN	SKPD Penanggung Jawab
			2019	
1.	Mewujudkan Administrasi Pertanahan keistimewaan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan Pelayanan Perijinan Pertanahan Keistimewaan. - Memformulasikan Penyelesaian konflik dan sengketa. - Harmonisasi status tanah yang sudah ada baik yang sudah dikuasai masyarakat. - instansi maupun yang belum ada penguasanya agar memiliki Kepastian Hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perijinan Pertanahan Keistimewaan telah berfungsi penuh - Mulai terjadi penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan - Meningkatnya prosentase Tertib Administrasi dari tahun sebelumnya 	Dinas PTR BAPPEDA DIY BPN DIY Kantah Kab/Kota Pemerintah Desa
2.	Mewujudkan Tertib Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah SG dan PAG	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Kepastian Hukum untuk Tanah-Tanah SG dan PAG. - Membangun Tanah SG dan PAG yang sesuai peruntukannya. - Memformulasi Penyelesaian konflik Tanah SG dan PAG. - Membangun Instrumen Kebijakan Tanah SG dan PAG. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jumlah Bidang SG dan PAG telah mulai memiliki kepastian Hukum - Meningkatnya Persentase jumlah kasus yang terselesaikan meningkat. - Terwujudnya Instrumen Kebijakan (SOP) 	Dinas PTR BAPPEDA DIY BPN DIY Kantah Kab/Kota Pemerintah Desa
3.	Mewujudkan Sistem Informasi Pertanahan Keistimewaan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan Ketersediaan Data Base Pertanahan. - Mengembangkan instrumen sistem informasi pertanahan keistimewaan. - Mengembangkan teknik-teknik pemeliharaan sistem informasi pertanahan keistimewaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya data base pertanahan yang terdata. - Terwujudnya instrumen sistem informasi pertanahan keistimewaan. 	Dinas PTR Dinas Perhubungan, Kominfo BAPPEDA DIY BPN DIY Kantah Kab/Kota Pemerintah Desa

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS

URUSAN TATA RUANG

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
<p><i>Pengaturan Tata Ruang Keistimewaan</i></p> <p>Mewujudkan dokumen regulasi Rencana Tata Ruang Keistimewaan menjadi produk hukum yang mengikat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Fasilitas Keistimewaan bidang tata ruang berdasarkan UUK dan Perda 1/2013 - Mendorong percepatan pelengkapan regulasi-regulasi terkait penataan ruang keistimewaan (Perda Tata Ruang, Perda RDTR Kawasan-Kawasan Keistimewaan)
<p><i>Pembinaan Tata Ruang Keistimewaan</i></p> <p>Mewujudkan koordinasi yang masif antar SKPD dan antar level pemerintahan (Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot) serta mewujudkan SDM (sumberdaya Manusia) yang siap untuk melaksanakan dan mewujudkan Tata Ruang Keistimewaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong optimalisasi Peran Pemkab/Pemkot dalam mendukung Kinerja Tata ruang sesuai dengan Kerangka Umum Kebijakan Tata Ruang Keistimewaan. - Peningkatan koordinasi antar SKPD dan antar level pemerintahan provinsi dengan kab/kota dalam tata ruang khususnya pada ruang-ruang keistimewaan - Mendorong penyelenggaraan pelatihan penataan ruang keistimewaan

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN
URUSAN TATA RUANG

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KEBERHASILAN	SKPD Penanggung Jawab
			2019	
1.	<i>Pengaturan Tata Ruang Keistimewaan</i> Mewujudkan dokumen regulasi Rencana Tata Ruang Keistimewaan menjadi produk hukum yang mengikat.	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Fasilitas Keistimewaan bidang tata ruang berdasarkan UUK dan Perda 1/2013 - Mendorong percepatan pelengkapan regulasi-regulasi terkait penatan ruang keistimewaan (Perda Tata Ruang, Perda RDTR Kawasan-Kawasan Keistimewaan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbitnya Perda RDTR Kawasan Keistimewaan sebanyak 40 % dari keseluruhan kawasan. 	Dinas PTR BAPPEDA DIY BAPPEDA Kab/Kota Biro Hukum Kab/Kota Bagian Hukum Kab/Kota DPRD DIY DPRD Kab/Kota
2.	<i>Pembinaan Tata Ruang Keistimewaan</i> Mewujudkan koordinasi yang masif antar SKPD dan antar level pemerintahan (Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot) serta mewujudkan SDM (sumberdaya Manusia) yang siap untuk melaksanakan dan mewujudkan Tata Ruang Keistimewaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong optimalisasi Peran Pemkab/Pemkot dalam mendukung Kinerja Tata ruang sesuai dengan Kerangka Umum Kebijakan Tata Ruang Keistimewaan. - Peningkatan koordinasi antar SKPD dan antar level pemerintahan provinsi dengan kab/kota dalam tata ruang khususnya pada ruang-ruang keistimewaan - Mendorong penyelenggaraan pelatihan penataan ruang keistimewaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya koordinasi melalui forum BKPD yang efektif dan efisien. - Terselenggaranya pelatihan Tata Ruang Keistimewaan 	Dinas PTR BAPPEDA DIY

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN
URUSAN TATA RUANG

No.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	INDIKATOR KEBERHASILAN	SKPD Penanggung Jawab
			2019	
3.	<p><i>Pelaksanaan Tata Ruang Kesitimewaan</i></p> <p>Membuat dan melengkapi perencanaan tata ruang seluruh ruang keistimewaan dan memperkuat pengendalian tata ruang pada seluruh ruang keistimewaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan Penyusunan RTR skala rinci pada ruang-ruang keistimewaan yang belum ada RTR-nya. - Mendorong Penerapan Rencana Tata Ruang sesuai dengan Rencana RTR skala rinci (RDTR/PZ) baik RTR skala rinci yang telah menjadi perda maupun yang masih berbentuk dokumen kajian dengan terobosan hukum (Pergub/Perbup/Perwal) - Memperkuat pengendalian dengan mempertajam rekomendasi dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang agar sesuai dengan RTR, instrumentasi insentif disinsentif dan mekanisme pemberian sanksi pelanggar RTR. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya RDTR Kawasan Keistimewaan sebanyak 40 % dari keseluruhan kawasan ruang keistimewaan - Kesesuaian Struktur Ruang dan Pola Ruang sebesar 65% - Perijinan mengacu sepenuhnya pada Perda RDTR dan atau Pergub/Perbup/Perwal. - Diberlakukannya insentif dan disinsentif terkait tata ruang keistimewaan. - Diberlakukannya sanksi terkait pelanggaran tata ruang 	<p>Dinas PTR</p> <p>BAPPEDA DIY</p> <p>BAPPEDA Kab/Kota</p> <p>Biro Hukum Kab/Kota</p> <p>Bagian Hukum Kab/Kota</p> <p>Dinas Perijinan Kab/Kota</p> <p>Dinas PUPESDM</p> <p>Dinas PU Kab/Kota</p> <p>Satpol PP DIY/Kab/Kota</p> <p>Kepolisian Daerah DIY</p>
4.	<p><i>Pengawasan Tata Ruang Keistimewaan</i></p> <p>Mewujudkan pengawasan pelaksanaan dan perwujudan tata ruang keistimewaan secara keseluruhan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang agar perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen RTR yang telah ada, baik yang berada di ruang-ruang keistimewaan maupun kawasan lainnya - Mendorong antisipasi dan penyelesaian konflik dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang di ruang-ruang keistimewaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya audit pemanfaat ruang - Teridentifikasinya pelanggaran Tata Ruang 	<p>Dinas PTR</p> <p>Satpol PP DIY/Kab/Kota</p> <p>Kepolisian Daerah DIY</p>

ഭാഗ്യമേലാ

